



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : RI Minta Kamboja Berpegang pada 5 Konsensus ASEAN
Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

RI Minta Kamboja Berpegang pada 5 Konsensus ASEAN Pemerintah Indonesia berharap Kamboja selaku Ketua ASEAN tahun ini menjadikan lima poin konsensus ASEAN sebagai panduan dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar. PHNOM PENH, RABU — Kamboja memulai tugas keketuaan ASEAN dengan lawatan Perdana Menteri Hun Sen ke Myanmar, Jumat-Sabtu (7-8/1/2022). Lawatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengatasi krisis politik di negara itu pascakudeta militer tahun 2021. Indonesia berharap Kamboja berpegang pada lima poin konsensus pemimpin ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Namun, beberapa pengamat khawatir posisi Kamboja sebagai Ketua ASEAN dikhawatirkan tak akan banyak membuat perubahan. Pengamat melihat sinyal diplomatik Hun Sen memperlihatkan potensi bakal ada inkonsistensi arah dan sikap antara Kamboja dan ASEAN mengenai junta Myanmar. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyatakan, Indonesia mendukung keketuaan Kamboja dan berharap agar keketuaan Kamboja bisa membuat ASEAN lebih solid, relevan, dirasakan manfaatnya oleh rakyat ASEAN, serta terus menjadi kontributor utama terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara. Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan dukungan Indonesia terhadap keketuaan Kamboja di ASEAN ketika berbicara dengan PM Hun Sen, 3 Januari lalu. Dalam pembicaraan melalui telepon itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan isu terkait Myanmar. "Semua dari kita sadar, sejauh ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap implementasi lima butir konsensus yang dihasilkan pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021," kata Retno ketika dihubungi Kompas, Rabu. Presiden Jokowi menyampaikan kepada PM Hun Sen harapan agar lima poin konsensus pemimpin ASEAN tetap menjadi panduan bagi upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis politik dan mengembalikan demokrasi di negara itu melalui dialog yang inklusif. Lima poin konsensus itu diharapkan tetap menjadi pegangan utusan khusus ASEAN dalam berkomunikasi dengan pihak militer di Myanmar. Kelima poin konsensus itu diputuskan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN dan Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta, 24 April 2021. Lima poin itu mencakup penghentian kekerasan dan sikap menahan diri, dialog konstruktif semua pihak, penunjukan utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus untuk bertemu semua pihak. Sebelum ada kemajuan signifikan dalam implementasi lima poin konsensus itu, Indonesia telah menyampaikan agar keterwakilan Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN tetap dilakukan pada level non-politik, sesuai kesepakatan menjelang KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 tahun 2021. Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengingatkan, krisis politik dan keamanan Myanmar semakin parah hingga menyebabkan krisis ekonomi, kesehatan, dan kemanusiaan. Ia menyebut situasi di Myanmar sudah kacau balau dari segala sisi. "Dari sisi kekuasaan, ada dua pemerintahan yang berjalan. Dari sisi keamanan, ada beberapa pasukan keamanan yang sama-sama bersenjata. Di saat yang sama, rakyat juga mogok lewat aksi yang mereka sebut gerakan pembangkangan pada pemerintah junta militer, dan banyak kelompok gerilyawan di sejumlah daerah di negara itu," papar Sokhonn ketika berbicara dalam diskusi di lembaga kajian ISEAS-Institut Yusof Ishak di Singapura, Senin lalu. "Kami merasa semua pemicu dan alasan terjadinya perang saudara sudah ada," ujarnya. Sokhonn menegaskan, kunjungan Hun Sen itu tidak lantas berarti baik Kamboja maupun ASEAN mengakui pemerintahan junta militer. Fokus Kamboja dan ASEAN hanya akan tertuju pada upaya memperbaiki situasi di Myanmar dengan menyusun peta jalan perdamaian dan konsensus lima poin seperti yang sudah ditujui para pemimpin ASEAN tahun lalu. "Kunjungan Hun Sen bertujuan membuka jalan agar tercipta suasana kondusif untuk dialog inklusif dan membangun kepercayaan politik antara semua pihak yang berkepentingan," kata Sokhonn. Tahun lalu, rencana kunjungan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar saat Ketua ASEAN dipegang Brunei Darussalam ditunda karena junta militer tidak memberikan izin pertemuan dengan Aung San Suu Kyi. ASEAN kemudian tidak mengundang junta militer Myanmar untuk ikut hadir dalam KTT ASEAN, Oktober lalu. Krisis Myanmar, kata Sokhonn, berdampak buruk bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara, citra, kredibilitas, dan persatuan kesatuan ASEAN. Meski demikian, Kamboja mengupayakan agar junta militer Myanmar boleh menghadiri pertemuan-pertemuan di ASEAN. Terancam stagnan Terkait posisi Kamboja sebagai Ketua ASEAN, pengamat ASEAN, kawasan Asia Tenggara, dan kerja sama internasional di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Muhammad Rum, khawatir bakal ada potensi stagnasi atau bahkan regresi ASEAN selama keketuaan Kamboja. Ia beralasan, pada saat ASEAN berupaya menekan junta militer Myanmar untuk memenuhi konsensus lima poin dan mengembalikan demokrasi, langkah diplomatik Hun Sen malah memperlihatkan sinyal inkonsistensi arah sikap ASEAN terhadap junta Myanmar. Menurut Rum, sikap Hun Sen cenderung pragmatis dan lunak terhadap junta militer Myanmar. Dikhawatirkan, Kamboja tak akan banyak membuat perubahan. Padahal, menjadi Ketua ASEAN merupakan posisi strategis dan penting mendorong agenda-agenda prioritas dalam KTT dan forum-forum ASEAN lain. Rum menilai, keinginan Hun Sen untuk merangkul kembali junta militer Myanmar dalam agenda-agenda ASEAN berpotensi menegasikan segala tekanan dan kecaman ASEAN sepanjang tahun lalu. Selain itu, ia juga mengingatkan soal isu ketegangan di Laut China Selatan (LCS). Sikap Pemerintah Kamboja pada keketuaan ASEAN 2012 telah menyebabkan ASEAN gagal menghasilkan komunikasi bersama untuk bersikap lebih tegas terhadap klaim China atas sembilan garis putus-putus. "Untuk menavigasi regresi di ASEAN, menjaditugas para diplomat Indonesia untuk berkomunikasi intensif dengan Kamboja dan memberi sinyal tegas bahwa Indonesia berkomitmen penuh pada demokrasi dan konsensus lima poin dan mengadvokasikan kepentingan regional dalam isu LCS. Perlu upaya keras untuk memengaruhi Phnom Penh," kata Rum. Kekhawatiran serupa diutarakan peneliti bidang politik internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lidya Christin Sinaga. Ia menyebut Kamboja memiliki persoalan internal terkait komitmen terhadap demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia. "Namun, saya yakin, ini semua menjadi pelajaran berharga bagi Kamboja dan Myanmar, ditambah kompleksitas persoalan internal ASEAN dan tantangan geopolitik kawasan, bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN 2022, ada kepentingan kawasan yang harus dimajukan," kata Lidya. (AFP/LUK)